

## Dinas PU Makassar Siapkan Rp543 Miliar Untuk Proyek Infrastruktur 2022



Sumber: [www.populernews.id](http://www.populernews.id)

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar melalui website Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) mengumumkan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp543 miliar untuk 404 kegiatan proyek infrastruktur pada 2022.

Dinas PU Makassar menjadi salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2021 dengan anggaran terbesar.

Kepala Dinas PU Makassar Zuhaelsi Zubir di Makassar, Senin mengatakan bahwa seluruh bidang di Dinas PU Makassar tengah menyiapkan seluruh dokumen untuk kegiatan.

“Kita sudah melaksanakan rapat dengan Bagian Pengadaan Barang Jasa (PBJ) dalam rangka melakukan review RUP,” katanya.

Pada laman website SiRUP, Dinas PU Makassar mengumumkan 48 paket proyek yang disiapkan bisa menelan anggaran mencapai Rp259,8 miliar dari total Rp543 miliar khusus untuk infrastruktur.

Lebih dari setengah anggaran tersebut akan dikucurkan untuk belanja modal bangunan gedung kantor. Total anggarannya mencapai Rp190 miliar.

Selain itu, Dinas PU juga menyiapkan sekitar Rp200 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Zuhaelsi mengatakan usai dilakukan kajian bersama, RUP Dinas PU Makassar akan diumumkan kembali pada laman SiRUP yang menargetkan pengumuman RUP akan tayang paling lambat pada akhir Februari 2022.

“Paling lambat akhir Februari. Lalu, Maret pelaksanaan tender,” ujarnya.

Tahun ini, Dinas PU Makassar mengelola anggaran sebesar Rp897,6 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi Rp195,3 miliar dan belanja modal Rp702,3 miliar.

Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Darlis mengatakan, semua bidang di Dinas PU Makassar tengah menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dari setiap kegiatan yang direncanakan.

Menurutnya, pengumuman RUP pada tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Pada 2022 ini, semua RUP yang diumumkan dipastikan akan ditender.

Berbeda dengan tahun lalu, terdapat banyak RUP yang diumumkan, namun kegiatan tersebut batal ditender. Salah satunya ialah pada pekerjaan pembangunan atau rehabilitasi jalan kota yakni terdapat 10 paket kegiatan yang direncanakan, namun hanya lima paket kegiatan yang berhasil dilaksanakan.

Kepala Dinas PU, Zuhaelsi Zubir mengatakan, alokasi anggaran terbesar ada di pembangunan infrastruktur jalan. Antara lain, pagu untuk jalan kota sekira Rp67 miliar, jalan lingkungan Rp74 miliar, jalur pedestrian Rp36 miliar. Serta penataan simpang jalan sebesar Rp15 miliar.

"Anggaran Rp897,6 miliar sebagian besar akan digunakan untuk pembangunan hingga rehabilitasi sejumlah program infrastruktur," ucap Zuhaelsi Zubir, Rabu (12/1/2022).

Pemkot Makassar juga kata Zuhaelsi akan melakukan penataan kawasan Jalan Jenderal Sudirman (Sudirman Look). Dinas PU Makassar mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,9 miliar.

Tak hanya itu, DPU juga berencana melakukan penataan koridor di beberapa jalan. Diantaranya koridor Landak, Rappocini, Sungai Saddang, dan Bumi Tamalanrea Permai (BTP).

Sementara untuk mengurai kemacetan dan memperlancar arus lalu lintas di BTP, tahun ini Pemkot akan membangun bundaran yang konsepnya mirip dengan Bundaran HI di Jakarta.

"Jadi konsepnya hampir mirip dengan bundaran HI," ungkapnya.

Selain itu, salah satu proyek monumental yang akan dibangun Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto melalui DPU, yakni membuat jalur pedestrian layang yang dinamai "Japparate". Proyek ini akan dibangun dari Benteng Rotterdam hingga Mal Pipo. Panjangnya sekira 2,5 km dengan anggaran Rp20 miliar.

"Untuk Japparate, akan dibuat jalan layang yang dibeton. Nantinya disiapkan fasilitas *jogging track* di atasnya, strukturnya terbuka," kata Zuhaelsi. Gedung dengan konsep modern juga akan dibangun di pusat kota. Gedung tersebut akan menjadi mal pelayanan publik (MPP) yang diberi nama *Government Center*. Lokasinya tepat di samping Taman Macan. Anggaran yang akan digelontorkan tak sedikit, mencapai Rp200 miliar.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan fokus dalam mendukung pembenahan infrastruktur untuk lorong wisata. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp4,4 miliar.

Anggaran tersebut, kata dia, akan digunakan untuk memperbaiki jalan, saluran drainase hingga pintu gerbang lorong wisata.

Sementara itu, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Tajuddin menerangkan, khusus untuk rehabilitasi jalan, anggaran yang disiapkan Dinas PU Makassar tahun ini sekitar Rp61 miliar. Rehabilitasi jalan ini menasar jalan-jalan yang rusak di Kota Makassar. Ada ratusan jalan yang butuh penanganan.

Menurut Tajuddin, berdasarkan data, jalan-jalan yang berada di dalam kota, umumnya dalam kondisi baik. Kebanyakan jalan yang perlu direhabilitasi berada di kawasan Biringkanaya, Manggala, dan Tamalate.

Selain itu, Pemkot Makassar tahun ini juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk pembangunan jembatan.

**Sumber:**

1. <https://makassar.antaranews.com/berita/353605/dinas-pu-makassar-siapkan-rp543-miliar-untuk-proyek-infrastruktur-2022>, Dinas PU Makassar Siapkan Rp543 Miliar Untuk Proyek Infrastruktur 2022, 7 Februari 2022;
2. <https://makassar.tribunnews.com/2022/01/12/anggaran-dinas-pu-rp8976-m-di-apbd-2022-fokus-infrastruktur-jalan-salah-satunya-bundaran-di-btp>, Anggaran Dinas PU Rp897,6 Miliar di APBD 2022, Fokus Infrastruktur Jalan Salah Satunya Bundaran di BTP, 12 Januari 2022;
3. <https://populernews.id/2022/02/dpu-makassar-siap-jalankan-program-strategis-adama-2022/>, DPU Makassar Siap Jalankan Program Strategis ADAMA 2022, 22 Februari 2022

**Catatan:**

**Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud dengan:**

Pasal 1

- Angka 19, Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- Angka 33, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai HPS tidak bersifat rahasia, namun rincian HPS bersifat rahasia. HPS digunakan sebagai:
  - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
  - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; dan
  - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% dari nilai HPS.

HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara. Penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa dengan pagu anggaran paling banyak sepuluh juta rupiah, e-purchasing, dan tender pekerjaan terintegrasi. Penetapan HPS paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir untuk pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pasca kualifikasi atau pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

- Angka 36, Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

## **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa**

### Pasal 20

(1) Pemaketan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan berorientasi pada:

- a. keluaran atau hasil;
- b. volume barang/jasa;
- c. ketersediaan barang/jasa;
- d. kemampuan pelaku usaha; dan/atau
- e. ketersediaan anggaran belanja

(2) dalam melakukan pemaketan pengadaan barang/jasa, dilarang:

- a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/ daerah masing-masing;
- b. menyatukan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
- c. menyatukan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
- d. memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi.

### Pasal 22

- (1) Pengumuman RUP Kementerian/ Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja.
- (2) Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- (4) Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/ atau media lainnya.
- (5) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).